FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya

IHDN Denpasar
bram.gus@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, affirms that children are a mandate as well as the gift of God the Almighty, which we must always guard because in them the dignity, dignity and rights as human beings must be upheld. Children who are victims of crime are weak people who often cannot protect and help themselves because of their situation and conditions. Crime of sexual violence against children is a crime that uses violence or threats of violence against children so that the child can be controlled for sexual relations. Internal factors causing criminal acts of sexual violence such as the proximity of the perpetrator to the victim, the role of the perpetrator, and the position of the victim. External factors that cause sexual violence crimes, namely environmental influences, such as being far from the crowd, lonely, or closed places that allow perpetrators to commit sexual violence.

Keywords: *causative factors, criminal acts, sexual violence, children*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak tidak dapat terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai hal tersebut. Di dalam Buku II KUHP Tentang Kejahatan termuat dalam Pasal 287, 288, 290, 292, dan 294 KUHP. Disamping KUHP, perlindungan terhadap anak juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 52

tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terhadap anak dengan jalan memberi perlindungan terhadap anak, namun masih diperlukan undang-undang yang khusus mengenai perlindungan anak. Undang-Undang perlindungan anak diperlukan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak.

Anak-anak korban kejahatan merupakan manusia golongan lemah yang sering kali tidak bisa melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya. Perlindungan khusus bagian anak korban kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;

- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh karenanya, setiap orang dalam kondisi apapun harus dilindungi kebebasannya, khususnya untuk anak yang masih di dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

II. PEMBAHASAN

2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum* (Prasetyo, 2010:45).

Atas dasar asas konkordansi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dahulu bernama *Wetboek van Starfrecht* berlaku di Indonesia. Pasal 1 KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008:54).

Di samping terdapat istilah perbuatan pidana juga terdapat istilah tindak pidana. Menurut Prasetyo (2010:47) istilah tindak pidana dimunculkan oleh Kementerian Kehakiman. Prof. Sudarto yang berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkahlaku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan

tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2010:48).

Dalam melakukan tindak pidana, karena suatu keadaan yang memaksa umumnya pelaku tindak pidana menggunakan kekerasan untuk melukai korban agar niatnya untuk melakukan tindak pidana tercapai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, bercirikan keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain atau ada paksaan.

Pengertian kekerasan tersebut menunjukan bahwa kekerasan yang menyebabkan cedera atau kerusakan fisik terhadap obyeknya, seperti melukai, menimbulkan cacat fisik, atau berdampak pada psikologis terhadap suatu obyek. Di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Selanjutnya, R. Soesilo (1991:98) berkomentar.

“Melakukan kekerasan” artinya: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

“Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

“Tidak berdaya” artinya : tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pelaku dengan kekerasan bisa melakukan tindak pidana kepada siapapun juga, salah satunya adalah anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai pengertian anak, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa, dimana seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Anak dalam KUH Perdata disebutkan orang yang belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 angka 1, pengertian anak adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya

disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dari beberapa pengertian anak di atas, umumnya apa bila anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, maka digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Wahyuningsih (2010:15) kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.

Edi Suharto (1997:365-366) mengelompokan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* menjadi empat, yaitu :

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau hinggakematian pada anak. Bentuk luka dari kekerasan fisik berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, cubitan bahkan bekas gigitan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku atau gambar film pornografi pada anak.
3. Kekerasan anak secara seksual, yakni dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi anak).

4. Kekerasan anak secara sosial, dimana dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.

Dari definisi kekerasan anak di atas, salah satunya adalah kekerasan anak secara seksual. Seksual berasal dari bahasa Inggris, yaitu *sex*. *Sex* dalam bahasa Inggris jenis kelamin. Namun, jenis kelamin yang dimaksudkan sebagai persoalan hubungan yang didasarkan atas nafsu kelamin, baik dilakukan melalui persetubuhan maupun pencabulan antara laki-laki dengan perempuan. Kekerasan seksual sebagai suatu seksual yang immoral atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang menyebabkan ketidakberdayaan bagi korban terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Huraerah (2006:60-61) tindakan kekerasan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Untuk lebih jelasnya, maka diuraikan sebagai berikut.

- a. Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan sering berdampak kemosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana

terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.

- b. *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- c. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat, dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Bentuk perilaku seks yang menyimpang salah satunya adalah bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi melalui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan juga dengan rayuan-rayuan yang dilakukan oleh pelaku agar korban dalam hal ini merupakan anak-anak mengikuti ajakan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual.

Dengan mengacu uraian di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasanya untuk melakukan hubungan seksual.

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

2.2.1 Faktor Internal

Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut.

Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya.

Disamping faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dengan korban, juga disebabkan oleh faktor peran pelaku dan posisi korban. Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani berpendapat:

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal. yakni pelaku, korban, situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan (Wahid dan Irfan, 2001 :66-67). Dari pendapat di atas menunjukkan, perkosaan atau kekerasan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh

pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. Di samping itu, kekerasan seksual juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban.

Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pihak korban cepat percaya dengan bujukan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi tergantung keberadaan pelaku. Psikolog Kartini Kartono berpendapat mengenai latar belakang pemerkosaan: pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistik (Kartono, 1981:169). Dari pendapat di atas, ditekankan mengenai faktor kriminologi perkosaan yang bersumber karena kesalahan pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksual yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan upaya penyaluran seksual yang benar.

Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya kekerasan seksual, seperti sikap, perilaku, cara menempatkan diri, dan cara bergaul, telah mendorong terjadinya kriminalitas. Posisi korban yang lemah sudah diketahui oleh pelaku sehingga pelaku tergoda untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, posisi korban yang merangsang atau menggunakan pakaian yang dapat merangsang pelaku juga dianggap oleh pelaku memberi peluang untuk bersetubuh.

2.2.2 Faktor Eksternal

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi,

ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual.

Sebagai contoh, perempuan yang berpergian sendiri, tanpa didampingi oleh orang terdekat merupakan sosok rentan atau rawan terjadinya kriminalitas terhadapnya. Dalam kondisi tersebut perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya. Dalam kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai objek kepentingan pelaku.

Selain pengaruh lingkungan atau kondisi, juga terdapat faktor yang lain, seperti pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

Pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kedekatan antara pelaku dengan korban, peran pelaku, dan posisi korban, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan atau kondisi tempat dilakukannya tindak pidana.

3. PENUTUP

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasainya untuk melakukan hubungan seksual. Secara umum yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kedekatan pelaku dengan korban, peran pelaku, dan posisi korban. Faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak (Cetakan Pertama)*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial (Jilid I)*. Jakarta: Rajawali.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerja Sosial*. Bandung: Lembaga Studi.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahyuningsih, Rini. 2010. "Peranan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak" (Skripsi). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK.....(Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, 1-7)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
153. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606.